



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
2025**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan disampaikan Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Dengan regulasi ini diharapkan Pemerintah dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (baik secara kualitas maupun kuantitas) dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Disamping itu, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi terhadap kemampuan kinerja aparatur pemerintah khususnya BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan aktivitas dan kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Palembang, 18 Februari 2025

**KEPALA BPSDMD PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

Prof. Dr. H.M. EDWAR JULIARTHA, S.Sos, MM
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 197507071997031003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang, Gambaran Umum	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Tujuan.....	3
1.4. Gambaran Umum OPD.....	4
1.4.1 Tugas Pokok	4
1.4.2 Fungsi	4
1.4.3 Struktur Organisasi.....	6
1.4.4 Sarana dan Prasarana.....	7
1.4.5 Komposisi Pegawai	8
1.5. Sistematika Penyajian	8
 BAB II PERENCANAAN KERJA.....	 10
2.1. Rencana Strategis	10
2.1.1. Visi	10
2.1.2. Misi	10
2.1.3. Tujuan dan Sasaran	11
2.1.4. Gambaran Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran.....	12
2.1.5. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	14
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
3.1. Pengukuran Kinerja.....	17
3.1.1. Pengembangan Kompetensi Manajerial.....	17
3.1.2. Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan.....	18
3.1.3. Pengembangan Kompetensi Teknis Inti	18
3.1.4. Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional.....	19
3.1.5. Monitoring dan Evaluasi.....	19
3.2. Capaian Kinerja Pengembangan SDM	20
3.2.1. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial.....	22
3.2.2. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan ..	23
3.2.3. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional	24
3.2.4. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti	25
3.2.5. Monitoring dan Evaluasi.....	26
3.2.5.1. Evaluasi Terhadap Penyelenggara	26
3.2.5.2. Evaluasi Terhadap Widyaiswara/Tenaga Pengajar.....	27
3.3. Evaluasi Terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama	27
3.3.1. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial	28
3.3.2. Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi Teknis dan fungsional, kompetensi sociocultural dan kompetensi pemerintahan.....	30
3.3.3. Persentase peningkatan program pelatihan yang terakreditasi	32
3.4. Akuntabilitas Keuangan	35
3.4.1. Pendapatan.....	35
3.4.2. Belanja	35
BAB IV PENUTUP	40
4.1. Kesimpulan.....	40
4.2. Saran	40

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Sarana dan Prasarana BPSDMD Prov. Sumsel Tahun 2024	7
1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	8
2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	12
2.2 Indikator Kinerja Utama	15
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	16
3.1 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Tahun 2024	20
3.2 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial	23
3.3 Kegiatan Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	23
3.4 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional...	24
3.5 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Inti	25
3.6 Capaian Indikator Kinerja.....	28
3.7 Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial tahun 2022-2024	29
3.8 Tabel analisis Keberhasilan pendidikan dan pelatihan manajerial	30
3.9 Perbandingan capaian kinerja pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis	31
3.10 Tabel analisis keberhasilan pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis	32
3.11 Tabel Pelatihan yang terakreditasi	33
3.12 Perbandingan Capaian Kinerja program pelatihan yang sesuai dengan standar.....	34
3.13 Tabel analisis keberhasilan program pelatihan yang sesuai dengan standar.....	34
3.14 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2024	35
3.15 Target dan Realisasi Belanja Tahun 2024	35
3.16 Realisasi program/kegiatan BPSDMD Prov. Sumsel Tahun 2024	36

DAFTAR GRAFIK

3.1	Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial tahun 2022-2024	29
3.2	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosiokultural dan kompetensi pemerintahan tahun 2022-2024	31
3.3	Persentase Peningkatan Program Pelatihan yang terakreditasi.....	34

DAFTAR LAMPIRAN

1. Tabel Renstra Tahun 2019 - 2024
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024
4. Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV Tahun 2024
5. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan 31 Desember 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu perangkat Pemerintah Daerah mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatra Selatan, berperan sebagai Lembaga hulu yang sangat strategis dalam mempersiapkan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Provinsi Sumatera Selatan.

Sumber Daya Aparatur saat ini dituntun untuk lebih optimal dalam memberikan pelayanan dan revitalisasi birokrasi dilingkungan pemerintahan daerah yang mengarah kepada efesiensi dan efektivitas pelayanan publik, dimana kerja pelayanan publik harus didukung dengan kapasitas dan kapabilitas aparatur yang mumpuni yang harus disesuaikan dengan latar belakang pendidikan, skill, training dan keterampilan khusus. Ketersediaan aparatur pemeritahan yang profesional dan handal saat ini, menjadi suatu keharusan dan kunci keberhasilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah harus mampu mempersiapkan diri memasuki era Pemerintahan yang kompetitif dan berdaya saing global yang diikuti dengan pertumbuhan nilai-nilai Demokratis ditingkat lokal. Upaya tersebut dilakukan agar desentralisasi dan otonomi daerah dapat berjalan pada pedoman yang benar sesuai dengan Peraturan yang berlaku sehingga dapat lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan

bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam mewujudkan good governance. Untuk mencapai keinginan dan harapan tersebut perlu didukung dengan Sumber daya Manusia (SDM) Aparatur yang memiliki Kompetensi optimal, mengingat Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam pembangunan.

Proses pembinaan dimaksud didukung dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional pada lembaga-lembaga Diklat.

Kebijakan utama yang tersirat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tersebut adalah mengangkat kompetensi sebagai fokus utama di dalam Sistem Diklat Aparatur. Dengan demikian, Diklat adalah sarana untuk mencapai kompetensi jabatan Aparatur, dan setiap jenis Diklat Aparatur yang diselenggarakan merupakan upaya untuk mencapai tingkat atau jenis kompetensi tertentu yang dibutuhkan oleh Aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.3 TUJUAN

Adapun tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 adalah sebagai :

1. Sarana pertanggungjawaban kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024
2. Bahan penilaian dan evaluasi keberhasilan dalam pencapaian kinerja tahunan, sehingga dapat memperbaiki kinerja organisasi di tahun yang akan datang;

3. Bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan, dan
4. Tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.

1.4 GAMBARAN UMUM OPD

1.4.1 Tugas Pokok

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur (Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan)

1.4.2 Fungsi

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Gubernur tersebut diatas menegaskan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan perencanaan program pengembangan sumber daya manusia provinsi ;
- b. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi dilingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
- c. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi dilingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Pengkoordinasian pengembangan kompetensi dilingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
- e. Pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur diprovinsi dan kabupaten/kota;
- f. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;

- g. Pelaksanaan administrasi BPSDMD; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Fungsi BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan sesuai Peraturan Daerah tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Perumusan bahan kebijaksanaan, analisa kebutuhan dan penyusunan program pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen pemerintahan, teknis, fungsional dan kepemimpinan serta melakukan perencanaan dan pengendalian Diklat;
- 2) Pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan daerah kabupaten/ kota;
- 3) Pelaksanaan pengajaran dan pelatihan;
- 4) Pelaksanaan seleksi/rekrutmen peserta diklat baik di bidang Diklat Manajemen Pemerintahan, teknis, fungsional maupun kepemimpinan;
- 5) Perumusan dan pengembangan desain kurikulum dan silabi diklat;
- 6) Penyusunan materi/bahan/modul diklat;
- 7) Pengembangan media dan alat bantu diklat;
- 8) Rekrutmen dan pembinaan widyaiswara/tenaga pengajar, peserta dan alumni Diklat Provinsi Sumatera Selatan;
- 9) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan rekomendasi hasil pendidikan dan pelatihan dalam Rangka pendayagunaan alumni diklat dalam pengembangan karier;
- 10) Pelaksanaan kerjasama dengan PTN/PTS dan pihak lainnya di bidang kediklatan;
- 11) Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan, rumah tangga, dokumentasi dan perpustakaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi.

1.4.3 Struktur Organisasi :

Dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi dan upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2016, adalah :

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretariat :
 - Subbag Umum dan Kepegawaian
 - Subbag Keuangan
 - Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- 3) Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan :
 - Subbid Sertifikasi Kompetensi
 - Subbid Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi
 - Subbid Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama
- 4) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti :
 - Subbid Jabatan Administrasi Pelayanan Dasar dan Pilihan
 - Subbid Jabatan Administrasi Non Pelayanan Dasar
 - Subbid Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang
- 5) Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial :
 - Subbid Manajerial Tingkat Tinggi
 - Subbid Manajerial Tingkat Menengah
 - Subbid Manajerial Tingkat Dasar
- 6) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional
 - Subbid Pengembangan Kompetensi Teknis Umum
 - Subbid Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan
 - Subbid Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional
- 7) Unit Pelaksana Teknis Badan
- 8) Pejabat Fungsional (Widyaiswara)

1.4.4 Sarana dan Prasarana

Tabel 1.1
Sarana dan Prasarana BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan

No	Sarana dan Prasarana	Gedung/Ruangan		Kapasitas Keseluruhan
		Jumlah	Fasilitas	
1	Gedung Administrasi	1 unit (2 lantai)	AC, Soundsystem, Meubelair	-
2	Gedung Widyaiswara dan Perpustakaan	1 unit (2 lantai)	AC, Soundsystem, Meubelair	
3	a. Aula Putri Kembar Dadar	1 Unit	AC, Sound System Lengkap	200 Kursi
	b. Aula Hulu Balang	1 Unit	SDA	80 kursi
4	Ruang Belajar	7 kelas	7 Ruang AC	280 orang
5	Gedung Asesment Center	2 lantai	AC, Sound Sistem, Proyektor	
6	Asrama/ Penginapan	71 Kamar	AC/kipas angin	211 orang
	a. Asrama Putri Rambut Selako	10 kamar	2 orang per kamar	20 orang
	b. Asrama Mayang Sari	15 kamar	5 orang per kamar	75 orang
	c. Asrama Bagus Kuning	12 Kamar	3 orang per kamar	36 orang
	d. Asrama Batuapi	11 kamar	3 orang per kamar	33 orang
	e. Asrama Dapuntahyang	24 kamar	2 orang per kamar	48 orang
	f. Asrama Tuan Junjungan	11 kamar	6 kamar kapasitas @3 orang, 5 kamar @1 orang/kamar	23 orang
7	Paviliun/Mess	1 Unit	6 Kamar AC	12 orang
8	Ruang Makan	4 Unit	Meja dan Kursi	280 Orang
9	Klinik / Balai Pengobatan	1 Unit	Type 36 2 Orang T.Medis 2 Mobil Ambulan	2 Kamar Tidur
10	Masjid	1 Unit	1 Unit	300 Orang
11	Rumah Dinas	2 Unit	2 Unit	Type 36 dan 54
12	Gedung Koperasi	1 Unit	Waserba/Kantin	20
13	Ruang Perpustakaan	1 Unit	24 Meja dan Kursi	24
14	Ruang Gym	1 Unit	2 Treadmill, 2 Sepeda Statis, 2 Mesin elliptical, Dumbbell, Barbell	-
15	Ruang Podcast	1 Unit	1 Meja, 2 Kursi, 3 Kamera, 1 Laptop, 1 TV	-

No	Sarana dan Prasarana	Gedung/Ruangan		Kapasitas Keseluruhan
		Jumlah	Fasilitas	
16	Lapangan Tenis	1 Unit	2 band	-
17	Lapangan Badminton	1 unit	1 Band	-
18	Tennis Meja	2 Unit	2 Meja	-
19	Meja Billiard	1 Unit	1 Meja	-
20	Kendaraan Dinas : Roda 2 Roda 4	3 Unit 14 Unit		Minibus 12 Unit Ambulan 1 Unit Pick Up 1 Unit

1.4.5 Komposisi Pegawai

Tabel 1.2

Komposisi Pegawai sesuai Jenjang Pendidikan per 31 Desember 2024

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
A	PNS	
1	S3	8
2	S2	42
3	S1/D4	11
4	D3	-
5	SMU	12
JUMLAH		73

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan selama Tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) 2020 diperbandingkan dengan Rencana Kinerja 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematiكا penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF, menyajikan ringkasan isi dari LKjIP tahun 2024

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, Gambaran Umum, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi, Isu Strategis, Maksud dan Tujuan.

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan Renstra 2019 - 2024, Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Penetapan Kinerja Tahun 2024.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengukuran kinerja, metode pengukuran pencapaian kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2024, Akuntabilitas Keuangan dan Tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2024 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2013-2018, memperhatikan hasil analisis isu strategis, mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk masa bhakti 2019-2023, mengikuti prioritas pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025, memperhatikan prioritas pembangunan nasional, merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, serta memperhatikan tujuan pembangunan millenium, maka visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah: **SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA**.

2.1.2 Misi

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas. Meningkatkan Pemerataan yang Berkeadilan.
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.
- 4) Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman &

perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.

- 5) Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis & berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tupoksinya mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur, untuk itu BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan harus dapat mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih yaitu Tujuan ke-4 yaitu **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan** dan sasaran ke-11 yaitu **Maju Aparatur yang Profesional dan Berintegritas** (melalui meningkatnya profesionalisme dan integritas aparatur pemerintah daerah).

Guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut, BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan menetapkan 2 tujuan yaitu Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang kompeten dan Mewujudkan Pengelolaan Kelembagaan Diklat yang sesuai dengan standar.

Untuk mewujudkan Tujuan Sumber Daya Aparatur yang kompeten tersebut, dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) Sasaran yaitu Meningkatkan Kompetensi Manajerial Aparatur, dan Meningkatkan Kompetensi Teknis Fungsional, Kompetensi Sosio-Cultural dan Kompetensi Pemerintahan ASN.

2.1.4 Gambaran Keterkaitan Misi, Tujuan dan sasaran

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan BPSDMD Prov. Sumsel

VISI : Sumsel Maju Untuk Semua			
MISI III : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang kompeten	1. Meningkatkan kompetensi manajerial Aparatur	1. Merencanakan program peningkatan kompetensi manajerial sesuai jenjang jabatan 2. Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN 3. Evaluasi pasca diklat	1. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pemangku kepentingan peningkatan kompetensi manajerial 2. Melaksanakan dan berpartisipasi dalam pengembangan kompetensi ASN 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi
	2. Meningkatkan kompetensi teknis fungsional, kompetensi sosio cultural dan kompetensi pemerintahan ASN	1. Merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosio kultural dan kompetensi pemerintahan ASN 2. Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN 3. Evaluasi pasca diklat	1. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pemangku kepentingan peningkatan kompetensi teknis dan fungsional, sosiokultural dan kompetensi pemerintahan 2. Melaksanakan dan berpartisipasi dalam pengembangan kompetensi ASN 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Pengelolaan Kelembagaan Diklat yang sesuai dengan standar	1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana kediklatan	Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan kediklatan	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana diklat 2. Penguatan SOP pengelolaan Sarana dan Prasarana diklat
	2. Meningkatkan kualitas tenaga kediklatan	Merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kualitas tenaga kediklatan	Melaksanakan dan berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan kualitas tenaga kediklatan seperti Training Officer Course, Management Of Training, Training Of Facilitator, Training Of Trainer, Workshop dan Focus Group Discussion
	3. Meningkatkan jumlah diklat yang terakreditasi	Terlaksananya peningkatan kualitas dan kuantitas akreditasi jenis diklat	1. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan diklat
	4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat	Terlaksananya kegiatan kediklatan yang berkualitas	1. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan diklat 2. Mengoptimalkan penggunaan metode, teknis dan strategi pembelajaran yang baik 3. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi diklat

2.1.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan, serta RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023. Indikator kinerja utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang digunakan untuk periode 2024-2026 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	4	5	6	7	8
1	Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang kompeten	Meningkatkan kompetensi manajerial aparatur	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial	$\frac{\text{Jumlah Pejabat Struktural yang telah mengikuti diklat manajerial/Struktural}}{\text{Jumlah Jabatan Struktural}} \times 100\%$	Data penyelenggaraan diklat Bidang Manajerial	Bidang Manajerial
		Meningkatkan kompetensi teknis, fungsional, kompetensi sosiokultural dan kompetensi pemerintahan ASN	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis, fungsional, sosiokultural dan Pemerintahan	$\frac{\text{Jumlah ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis, fungsional, sosiokultural dan pemerintahan}}{\text{Jumlah ASN Provinsi Sumsel}} \times 100\%$	Data pengembangan kompetensi pada Bidang Teknis Inti, Bidang Teknis Umum dan Fungsional, Bidang Sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan	, Bidang Teknis Inti, Bidang Teknis Umum dan Fungsional, Bidang Sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan
2	Meningkatnya Kualitas lembaga Pelatihan	Meningkatkan Pengelolaan Program Pelatihan yang sesuai dengan standar	Persentase Peningkatan Program Pelatihan yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah Program Pelatihan yang diakreditasi pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah Total Program Pelatihan yang telah terakreditasi}} \times 100\%$	Bidang Sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan	Bidang Sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang telah disesuaikan dengan *cascading*, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan kompetensi manajerial Aparatur	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial / struktural	92%
2.	Meningkatkan kompetensi teknis fungsional, kompetensi sosio kultural dan kompetensi pemerintahan ASN	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosio kultural dan kompetensi pemerintahan	80%
3.	Meningkatkan pengelolaan program pelatihan yang sesuai dengan standar	Persentase Peningkatan Program Pelatihan yang terakreditasi	15%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan proses penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dalam rangka menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan secara simetris rencana tingkat capaian (target) dengan realisasi yang diperoleh. Berdasarkan perencanaan kinerja Tahun 2024, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain :

3.1.1. Pengembangan Kompetensi Manajerial;

Pengembangan Kompetensi Manajerial adalah Pengembangan Kompetensi Manajemen Pemerintahan dan Kepemimpinan, yakni yang terkait dengan;

- a. Pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah (KDH/Wakil KDH, pimpinan/anggota DPRD, Camat);
- b. Pengembangan kompetensi bagi pimpinan tinggi utama, madya, dan pratama (teknis, kepemimpinan);
- c. Pengembangan kompetensi kepemimpinan dan prajabatan bagi jabatan administrasi dan kader PNS.

Pelatihan Kepemimpinan adalah Pelatihan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Pelatihan Kepemimpinan yang dilaksanakan oleh BPSMD Provinsi Sumatera Selatan adalah Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Selain itu dalam rumpun diklat kepemimpinan juga dilaksanakan Pelatihan Dasar CPNS yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, di samping

pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat. Pelatihan Dasar CPNS yang dilaksanakan oleh BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan adalah Pelatihan Dasar CPNS Golongan III dan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II.

3.1.2. Sertifikasi Kompetensi dan pengelolaan Kelembagaan;

Sertifikasi kompetensi diperlukan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia serta penguatan kelembagaannya, yakni yang terkait dengan;

- a. Sertifikasi kompetensi yang harus melalui uji kompetensi untuk mengukur kompetensi aparatur yang dibandingkan dengan standarisasi kompetensi jabatan tertentu termasuk pengelolaan lembaga sertifikasi;
- b. Pengelolaan kelembagaan pengembangan sumber daya manusia dengan tujuan meningkatkan fungsi kelembagaan dan pengembangan kompetensi bagi pengembang kompetensi (tenaga pengajar/ToT/MoT, Asessor, pengelolaan sarana pengembang/pembelajaran;
- c. Pengelolaan sumber belajar dan kerjasama dengan sasaran pembelajaran, perangkat pembelajaran serta pengembangan kerjasama.

3.1.3. Pengembangan Kompetensi Teknis Inti;

Pengembangan Kompetensi Teknis Inti adalah pengembangan kompetensi yang berkaitan langsung dengan tugas fungsi jabatan, yakni yang terkait dengan:

- a. Urusan konkuren wajib pelayanan dasar (yang mencakup urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman trantibumlinmas dan sosial serta pilihan yaitu kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, ESDM, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi;

- b. Urusan konkuren wajib non pelayanan dasar (yang mencakup urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, admindukcapil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan);
- c. Perangkat daerah penunjang yaitu sebagai pendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (badan daerah dan sekretariat daerah).

Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS, baik yang terkait dengan Urusan konkuren wajib pelayanan dasar, Urusan konkuren wajib non pelayanan ataupun perangkat daerah penunjang.

3.1.4. Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional:

Pengembangan kompetensi teknis umum dan fungsional adalah pengembangan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap jabatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sedangkan pengembangan kompetensi teknis fungsional bagi yang menduduki jabatan fungsional, yakni yang terkait dengan :

- a. Pengembangan kompetensi umum dan wajib dimiliki oleh setiap jabatan (sistem pemerintahan, manajemen pembangunan, Wasbang);
- b. Pengembangan kompetensi pilihan yang harus dimiliki (sosial kultural) oleh setiap jabatan yang sesuai dengan daerahnya masing-masing (kompetensi lain diluar jabatannya);
- c. Pengembangan kompetensi jabatan fungsional bagi yang akan atau sudah menduduki jabatan fungsional.

Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing serta

dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kediklatan. Diklat Fungsional yang dilaksanakan oleh BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan antara lain : Diklat fungsional keterampilan dan diklat fungsional keahlian, baik untuk pembentukan jabatan fungsional, alih jenjang maupun peningkatan kompetensi pejabat fungsional.

3.1.5. Monitoring dan Evaluasi.

Kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang dalam siklus manajemen kediklatan aparatur yang menjamin agar kegiatan diklat tetap sesuai dengan standar-standar yang berlaku serta pengendalian mutu secara komprehensif dan berkelanjutan.

3.2 Capaian Kinerja Pengembangan SDM

Pada tahun 2024 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan secara total telah menyelenggarakan 51 jenis Kegiatan diklat dan bimbingan teknis, dengan Total Peserta berjumlah 2.603 orang, seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Tahun 2024

No	Bidang Diklat	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Dana
I.	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial					
1.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I	orang	40 Orang	40 Orang	100%	BLUD
2.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II	orang	40 Orang	40 Orang	100%	BLUD
3.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan III	orang	40 Orang	40 Orang	100%	BLUD
4.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan IV	orang	40 Orang	40 Orang	100%	BLUD
5.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan V	orang	37 Orang	37 Orang	100%	BLUD
6.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I	orang	40 Orang	40 Orang	100%	BLUD

No	Bidang Diklat	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Dana
7.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan II	orang	40 Orang	40 Orang	100%	BLUD
8.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan III	orang	40 Orang	40 Orang	100%	BLUD
9.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV	orang	40 Orang	40 Orang	100%	BLUD
10.	Pelatihan Kepemimpinan Nasional XXXVII	orang	59 Orang	59 Orang	100%	BLUD
	Jumlah :			416 Orang		
II.	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Dan Fungsional					
1.	Diklat Fungsional Bendahara Sekolah	orang	30 Orang	30 Orang	100%	APBD
2.	Diklat fungsional Bidan	orang	30 Orang	30 Orang	100%	APBD
3.	Diklat Fungsional Tenaga Perawat Kesehatan	orang	30 Orang	30 Orang	100%	APBD
4.	Diklat Pengelola Keuangan Non ASN untuk tenaga akuntansi dan verifikator Provinsi Sumatera Selatan	orang	45 Orang	45 Orang	100%	BLUD
5.	Diklat Bendahara Kesehatan bagi pegawai ASN angkatan I Provinsi Sumatera Selatan	orang	43 Orang	43 Orang	100%	BLUD
6.	Diklat Bendahara Kesehatan bagi pegawai ASN angkatan II Provinsi Sumatera Selatan	orang	41 Orang	41 Orang	100%	BLUD
	Jumlah :			219 Orang		
III.	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti					
1.	Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Perda dan perkada	Orang	26 Orang	26 Orang	100%	BLUD
2.	Bimtek penyusunan Perda dan Perkada	Orang	40 Orang	40 Orang	100%	APBD
3.	Bimtek Bendahara angkatan I	Orang	40 Orang	40 Orang	100%	APBD
4.	Bimtek Bendahara angkatan II	Orang	50 Orang	50 Orang	100%	BLUD
5.	Bimtek Pengelolaan Arsip Dinamis	Orang	40 Orang	40 Orang	100%	APBD

No	Bidang Diklat	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Dana
6.	Pelatihan Dasar Peningkatan Kapasitas Bagi Anggota Satpol PP Angkatan I,II,III	Orang	107 Orang	107 Orang	100%	BLUD
7.	Pelatihan Dasar Peningkatan Kapasitas Bagi Anggota Satpol PP	Orang	36 Orang	36 Orang	100%	BLUD
8.	Pelayanan Teknis Manajemen ASN Jabatan Fungsional Analis SDM	Orang	41 Orang	41 Orang	100%	BLUD
9.	Bimtek Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Orang	21 Orang	21 Orang	100%	BLUD
10.	Orientasi Anggota DPRD kabupaten/Kota Se Sumatera Selatan 12 Angkatan	Orang	645 Orang	645 Orang	100%	BLUD
11.	Pelatihan Dasar Peningkatan Kapasitas Perhubungan Pemerintah Kabupaten PALI	Orang	40 Orang	40 Orang	100%	BLUD
12.	Diklat Bendahara Keuangan Angkatan I	Orang	30 Orang	30 Orang	100%	BLUD
13.	Diklat Bendahara Keuangan Angkatan II	Orang	30 Orang	30 Orang	100%	BLUD
14.	Pelatihan Dasar Manajemen Bencana Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Orang	49 Orang	49 Orang	100%	BLUD
	Jumlah :			1.195 Orang		
IV.	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan					
1.	Penyelenggaraan Akreditasi	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	APBD
2.	Bimtek Peningkatan Kapasitas Asesor Kompetensi	Orang	30 Orang	30 Orang	100%	APBD
3.	Bimtek Standarisasi Dan Sertifikasi	Orang	30 Orang	30 Orang	100%	APBD
4.	Penyusunan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	APBD
5.	Bimtek PBJ level 1 Angkatan I	Orang	38 Orang	38 Orang	100%	BLUD
6.	Bimtek PBJ level 1 Angkatan II	Orang	40 Orang	40 Orang	100%	BLUD
7.	Bimtek PBJ level 1 Angkatan III	Orang	29 Orang	29 Orang	100%	BLUD
8.	Bimtek PPK Tipe C Angkatan I	Orang	30 Orang	30 Orang	100%	BLUD
9.	Bimtek PPK Tipe C Angkatan II	Orang	28 Orang	28 Orang	100%	BLUD
10.	Bimtek PPK Tipe C Angkatan III	Orang	23 Orang	23 Orang	100%	BLUD
11.	Bimtek PPK Tipe C Angkatan IV	Orang	22 Orang	22 Orang	100%	BLUD
12.	Uji Kompetensi PBJ level 1 angkatan I	Orang	26 Orang	26 Orang	100%	BLUD
13.	Uji Kompetensi PBJ level 1 angkatan II	Orang	50 Orang	50 Orang	100%	BLUD

No	Bidang Diklat	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Dana
14.	Uji Kompetensi PBJ level 1 angkatan III	Orang	59 Orang	59 Orang	100%	BLUD
15.	Uji Kompetensi PBJ level 1 angkatan IV	Orang	49 Orang	49 Orang	100%	BLUD
16.	Uji Kompetensi di Asessment Center Angkatan I	Orang	15 Orang	15 Orang	100%	BLUD
17.	Uji Kompetensi di Asessment Center Angkatan II	Orang	20 Orang	20 Orang	100%	BLUD
18.	Uji Kompetensi di Asessment Center Angkatan III	Orang	60 Orang	60 Orang	100%	BLUD
19.	Uji Kompetensi di Asessment Center Angkatan IV	Orang	58 Orang	58 Orang	100%	BLUD
20.	Uji Kompetensi di Asessment Center Angkatan V	Orang	57 Orang	57 Orang	100%	BLUD
21.	Pelatihan Training of Trainer (ToT) Orientasi DPRD	Orang	59 Orang	59 Orang	100%	BLUD
22.	Uji Sertifikasi Kompetensi Pengelolaan Keuangan Daerah	Orang	25 Orang	25 Orang	100%	BLUD
23.	Uji Kompetensi Perpindahan Ke Dalam Jabatan dan Kenaikan Jabatan Fungsional Pol PP Tahun 2024	Orang	54 Orang	25 Orang	100%	BLUD
Jumlah :				773 Orang		

Capaian kinerja pada masing-masing bidang pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Prov. Sumsel dapat diuraikan sebagai berikut :

3.2.1 Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial

Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial pada tahun 2024 telah melaksanakan beberapa kegiatan yaitu Pelatihan Kepemimpinan Administrator (5 Angkatan) dengan target 197 peserta, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebanyak (4 angkatan) dengan target 160 peserta dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional sebanyak 59 peserta, seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial

No	Kegiatan/Diklat	Jumlah Peserta			Sumber Dana
		Target	Realisasi	%	
1	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	197 orang	197 orang	100	BLUD
2	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	160 orang	160 orang	100	BLUD
3	Pelatihan Kepemimpinan Nasional	59 orang	59 orang	100	BLUD
	Total	416 orang	416 orang	100	BLUD

3.2.2 Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan

Bidang sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan pada tahun 2024 menyelenggarakan 23 kegiatan yang terdiri dari Penyelenggaraan Akreditasi, Penyusunan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi, Bimtek Peningkatan Kapasitas Asesor Kompetensi, Bimtek Standarisasi dan Sertifikasi, Bimtek PBJ level I dengan 3 Angkatan, Pelatihan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) tipe C dengan 4 angkatan, Pelaksanaan uji kompetensi pengadaan barang jasa/pemerintah dengan 5 angkatan, Pelatihan Training of Trainer (ToT) Orientasi DPRD, Uji Sertifikasi Kompetensi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Uji Kompetensi Perpindahan Ke Dalam Jabatan Fungsional Pol PP, dengan jumlah keseluruhan peserta berjumlah 773 orang, uraian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Kegiatan Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan

No	Kegiatan/Diklat	Jumlah Peserta			Sumber Dana
		Target	Realisasi	%	
1	Penyelenggaraan Akreditasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100	APBD
2	Bimtek Peningkatan Kapasitas Asesor Kompetensi	30 Orang	30 Orang	100	APBD
3	Bimtek Standarisasi dan Sertifikasi	30 Orang	30 Orang	100	APBD
4	Penyusunan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi	1 Dokumen	1 Dokumen	100	APBD
5	Bimtek PBJ level 1 Angkatan I	38 Orang	38 Orang	100	BLUD
6	Bimtek PBJ Level 1 angkatan II	40 Orang	40 Orang	100	BLUD

No	Kegiatan/Diklat	Jumlah Peserta			Sumber
		Target	Realisasi	%	Dana
7	Bimtek PBJ Level 1 Angkatan III	29 Orang	29 Orang	100	BLUD
8	Bimtek PPK Tipe C Angkatan I	30 Orang	30 Orang	100	BLUD
9	Bimtek PPK Tipe C Angkatan II	28 Orang	28 Orang	100	BLUD
10	Bimtek PPK Tipe C Angkatan III	23 Orang	23 Orang	100	BLUD
11	Bimtek PPK Tipe C Angkatan IV	22 Orang	22 Orang	100	BLUD
12	Uji Kompetensi PBJ level 1 Angkatan I	26 Orang	26 Orang	100	BLUD
13	Uji Kompetensi PBJ level 1 Angkatan II	50 Orang	50 Orang	100	BLUD
14	Uji Kompetensi PBJ level 1 Angkatan III	59 Orang	59 Orang	100	BLUD
15	Uji Kompetensi PBJ level 1 Angkatan IV	49 Orang	49 Orang	100	BLUD
16	Uji Kompetensi di Asesment Center Angkatan I	15 Orang	15 Orang	100	BLUD
17	Uji Kompetensi di Asesment Center Angkatan II	20 Orang	20 Orang	100	BLUD
18	Uji Kompetensi di Asesment Center Angkatan III	60 Orang	60 Orang	100	BLUD
19	Uji Kompetensi di Asesment Center Angkatan IV	58 Orang	58 Orang	100	BLUD
20	Uji Kompetensi di Asesment Center Angkatan V	57 Orang	57 Orang	100	BLUD
21	Pelatihan Training of Trainer (ToT) Orientasi DPRD	59 Orang	59 Orang	100	BLUD
22	Uji Sertifikasi Kompetensi Pengelolaan Keuangan Daerah	25 Orang	25 Orang	100	BLUD
23	Uji Kompetensi Perpindahan Ke Dalam Jabatan Fungsional Pol PP Tahun 2024	54 Orang	54 Orang	100	BLUD
	Total	773 Orang	773 orang	100	APBD + BLUD

3.2.3 Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional

Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional pada tahun 2024 telah menyelenggarakan 6 kegiatan yaitu Diklat Fungsional Bendahara Sekolah, Diklat Fungsional Bidan, Diklat Fungsional Tenaga Perawat Kesehatan, Diklat Pengelola Keuangan Non ASN untuk tenaga Akutansi dan Verifikator Provinsi Sumsel 2 Angkatan, dengan total keseluruhan peserta berjumlah 219 orang, seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Kegiatan Pengembangan Kompetensi teknis Umum dan Fungsional

No	Kegiatan/Diklat	Jumlah Peserta			Sumber dana
		Target	Realisasi	%	
1	Diklat Fungsional Bendahara Sekoiah	30 Orang	30 Orang	100	APBD
2	Diklat Fungsional Bidan	30 Orang	30 Orang	100	APBD
3	Diklat Fungsional Tenaga Perawat Kesehatan	30 Orang	30 orang	100	APBD
4	Diklat Pengelola Keuangan Non ASN untuk tenaga Akutansi dan Verifikator Provinsi Sumsel	45 Orang	45 Orang	100	BLUD
5	Diklat Bendahara Kesehatan bagi Pegawai ASN Angkatan I Provinsi Sumsel	43 Orang	43 Orang	100	BLUD
6	Diklat Bendahara Kesehatan bagi Pegawai ASN Angkatan II Provinsi Sumsel	41 Orang	41 Orang	100	BLUD
	TOTAL	219 Orang	219 Orang	100	APBD + BLUD

3.2.4 Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti

Bidang pengembangan kompetensi teknis inti pada tahun 2024 menyelenggarakan 14 kegiatan kediklatan yaitu Pendidikan & Pelatihan Penyusunan Perda dan Perkada, Bimtek Penyusunan Perda dan Perkada, Bimtek Bendahara (2 Angkatan), Bimtek Pengelolaan Arsip Dinamis, Pelatihan Dasar Peningkatan Kapasitas Bagi Anggota Sat Pol PP 5 Angkatan, Pelatihan Dasar Peningkatan Kapasitas Bagi Anggota Sat Pol PP, Pelayanan Teknis Manajemen ASN Jabatan Fungsional Analis SDM, Bimtek Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, Orientasi Anggota DPRD Kab/Kota se Sumsel 12 Agkatan, Pelatihan Dasar Peningkatan Kapasitas Perhubungan Kabupaten PALI, Diklat Bendahara Keuangan (2 Angkatan), Pelatihan Dasar Manajemen Bencana Pemerintah Prov. Sumsel dengan jumlah keseluruhan peserta berjumlah 1.239 orang, seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Inti

No	Kegiatan/Diklat	Jumlah Peserta			Sumber Dana
		Target	Realisasi	%	
1	Pendidikan & Pelatihan Penyusunan Perda dan Perkada	26 Orang	26 Orang	100	BLUD
2	Bimtek Penyusunan Perda dan Perkada	40 Orang	40 Orang	100	APBD
3	Bimtek Bendahara Angkatan I	40 Orang	40 Rrang	100	APBD
4	Bimtek Bendahara Angkatan II	50 Orang	50 Orang	100	BLUD
5	Bimtek Pengelolaan Arsip Dinamis	40 Orang	40 Orang	100	APBD
6	Pelatihan Dasar Peningkatan Kapasitas Bagi Anggota Sat Pol PP Angkatan I,II,III dan V	147 Orang	147 Orang	100	BLUD
7	Pelatihan Dasar Peningkatan Kapasitas Bagi Anggota Sat Pol PP	36 Orang	36 Orang	100	BLUD
8	Pelayanan Teknis Manajemen ASN Jabatan Fungsional Analis SDM	41 Orang	41 Orang	100	BLUD
9	Bimtek Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	21 Orang	21 Orang	100	BLUD
10	Orientasi Anggota DPRD Kab/Kota se Sumsel, 12 Agkatan	645 Orang	645 Orang	100	BLUD
11	Pelatihan Dasar Peningkatan Kapasitas Perhubungan Kabupaten PALI	40 Orang	40 Orang	100	BLUD
12	Diklat Bendahara Keuangan Angkatan I	30 Orang	30 Orang	100	BLUD
13	Diklat Bendahara Keuangan Angkatan II	30 Orang	30 Orang	100	
14	Pelatihan Dasar Manajemen Bencana Pemerintah Prov. Sumsel	49 Orang	49 Orang	100	BLUD
	Total	1.235 Orang	1.235 Orang	100	APBD + BLUD

3.2.5 Monitoring Evaluasi

Kegiatan monitoring evaluasi diklat dilakukan terhadap semua kegiatan diklat yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Evaluasi ini dilakukan terhadap pihak panitia penyelenggara ataupun tenaga pengajar/widyaiswara, dengan dilakukannya evaluasi penyelenggaraan diklat ini diharapkan akan menghasilkan data tentang kualitas penyelenggaraan diklat baik dari aspek program, widyaiswara,

penyelenggara ataupun sarana dan prasarana penunjang. Hasil olah data monitoring evaluasi dibuat dalam laporan tersendiri yang dilaporkan oleh Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

3.2.5.1 Evaluasi Terhadap Penyelenggara

Laporan evaluasi penyelenggaraan diklat diperoleh dari hasil pengisian form evaluasi dan monitoring penyelenggaraan Diklat, baik diklat dibidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional, Diklat Pengembangan Kompetensi Manajerial, Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis Inti. Hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan diklat dibuat tersendiri dalam bentuk laporan monitoring evaluasi kegiatan kediklatan. Adapun indikator yang dinilai oleh peserta terhadap penyelenggara adalah sebagai berikut :

- Efektivitas Penyelenggaraan
- Kesiapan, Ketersediaan dan Keberfungsian sarana dan Prasarana
- Kesesuaian Pelaksanaan Program dengan Rencana
- Ketersediaan dan Kelengkapan Bahan Diklat
- Pelayanan Terhadap Peserta Diklat
- Pelayanan Terhadap Widyaiswara
- Administrasi Diklat

3.2.5.2 Evaluasi Terhadap Widyaiswara/Tenaga Pengajar

Laporan evaluasi terhadap widyaiswara/tenaga pengajar diklat diperoleh dari hasil pengisian form evaluasi dan monitoring terhadap widyaiswara/tenaga pengajar yang mengampu/mengajar pada kegiatan Diklat dibidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional, Diklat Pengembangan Kompetensi Manajerial, Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis Inti. Hasil evaluasi terhadap widyaiswara/tenaga pengajar dibuat tersendiri dalam laporan monitoring evaluasi

kediklatan. Adapun indikator yang dinilai oleh peserta terhadap widyaiswara/tenaga pengajar adalah sebagai berikut:

- sistematika penyajian
- Kemampuan penyajian
- Ketepatan waktu dan kehadiran
- penggunaan metode dan sarana diklat
- sikap dan perilaku
- cara menjawab pertanyaan dari peserta
- penggunaan bahasa
- pemberian motivasi kepada peserta
- kerapihan berpakaian
- kerjasama antar widyaiswara (dalam tim)

3.3 EVALUASI TERHADAP CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 mempunyai 3 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kompetensi manajerial Aparatur	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial / struktural	92%	88%	96%
2	Meningkatkan kompetensi teknis fungsional, kompetensi sosio kultural dan kompetensi pemerintahan ASN	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosio kultural dan kompetensi pemerintahan	80%	82%	102,5%

3	Meningkatkan pengelolaan program pelatihan yang sesuai dengan standar	Persentase Peningkatan Program Pelatihan yang terakreditasi	15%	33%	220%
---	---	---	-----	-----	------

3.3.1 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial

Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial yang baik diukur dengan cara membandingkan jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklat manajerial/struktural dengan Jumlah jabatan struktural Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan dikalikan 100 persen. Indikator ini pencapaiannya didukung oleh Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial BPSDMD Prov. Sumsel.

Pada tahun 2023, jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan berjumlah 1.185 orang dari total 1.303 jabatan baik Eselon II, III, dan IV di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sehingga capaian indikator persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial pada tahun 2023 telah mencapai 91%.

Pada Tahun 2024, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial melaksanakan 3 jenis kegiatan Diklat Manajerial yaitu Pelatihan Kepemimpinan Nasional, Pelatihan Kepemimpinan Administrator (5 angkatan) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (4 Angkatan) dengan total peserta sebanyak 416 orang yang berasal dari Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, dan Instansi dari Luar Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan dari keseluruhan kegiatan yang berjumlah peserta 416 orang pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional, Pelatihan kepemimpinan administrator maupun Pelatihan Kepemimpinan pengawas, peserta yang berasal dari Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 115 orang.

Dari hasil data MyASN Pemprov Sumsel dapat diketahui bahwa jumlah Pejabat Struktural yang telah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan sampai dengan

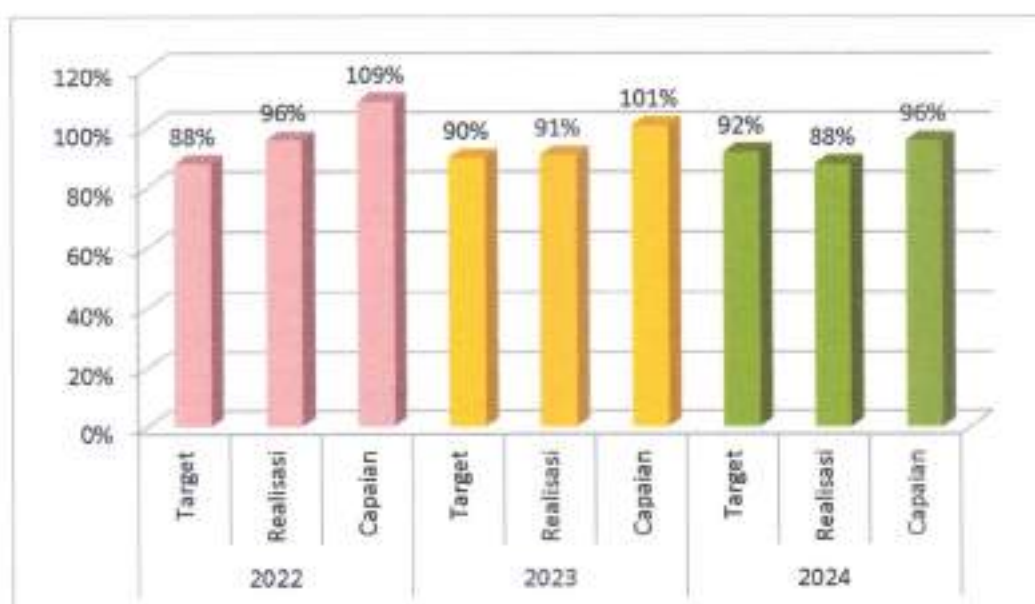
Tahun 2024 berjumlah 1.124 orang dari total pejabat struktural 1.278.orang atau 88%.

Sehingga dalam hal ini didapatkan persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pada Tahun 2024 dari target sebesar 92% terealisasi sebesar 88% atau capaian sebesar 96%.

Tabel 3.7
Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial tahun 2022-2024

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%
1.	Meningkatkan kompetensi manajerial aparatur	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial	88	96	109	90	91	101	92	88	96

Grafik 3.1
Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial tahun 2022-2024



Penjelasan :

Pada Grafik memperlihatkan bahwa Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial dari tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024. Pada tahun 2022 tercatat target capaian kinerja sebesar 88%, dengan realisasi 96% dengan capaian sebesar 109%. Pada Tahun 2023 mengalami peningkatan dengan terget 90% dengan realisasi sebesar 91% atau capaian sebesar 101%. Sedangkan pada tahun 2024 ada penurunan angka persentase dari target 92%, dengan realisasi sebesar 88% atau capaian 96%.

Tabel 3.8
Tabel Analisis Keberhasilan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan
1.	Meningkatkan kompetensi manajerial aparatur	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial	92	88	96	- Adanya rotasi dan mutasi pejabat struktural - Pelatihan Kepemimpinan masih belum menjadi syarat mutlak untuk menduduki jabatan struktural

3.3.2 Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sociocultural dan kompetensi pemerintahan

Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosiokultural dan kompetensi pemerintahan yang baik diukur dengan cara membandingkan jumlah ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis, fungsional, sosiokultural dan pemerintahan dengan Jumlah ASN Provinsi Sumatera Selatan dikalikan 100 persen. Indikator ini pencapaiannya didukung oleh Bidang Teknis Inti, Bidang Teknis Umum dan

Fungsional, Bidang Sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembangaan. Indikator ini pencapaiannya didukung melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Realisasi Tahun 2023 total ASN yang telah mengikuti pelatihan teknis dan fungsional berjumlah 12.148 orang dari total 15.634 orang atau 77,7%.

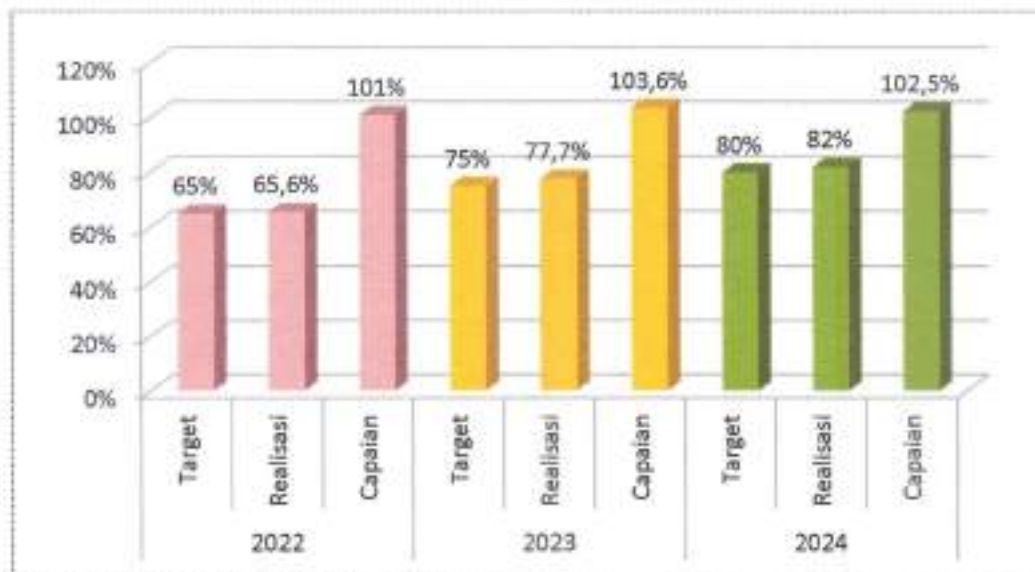
Untuk Tahun 2024, target capaian indikator Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sociocultural dan kompetensi pemerintahan adalah sebesar 80%. Pada tahun 2024, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan kegiatan kediklatan kepada ASN Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 684 orang, dengan rincian Pelatihan bidang manajerial 115 orang, pelatihan bidang teknis inti 326 orang, pelatihan bidang sertifikasi kompetensi 161 orang dan bidang teknis umum dan fungsional berjumlah 82 orang., sehingga total ASN Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengikuti pelatihan teknis dan fungsional tahun 2024 berjumlah 12.832 orang dari total 15.634 orang atau 82%.

Tabel 3.9

Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sociocultural dan kompetensi pemerintahan Tahun 2022-2024

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatkan kompetensi teknis, fungsional, kompetensi sosiokultural dan kompetensi pemerintahan ASN	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosio, cultural dan kompetensi pemerintahan	65	65,6	101	75	77,7	103,6	80	82	102,5

Grafik 3.2
Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosiokultural dan kompetensi pemerintahan



Penjelasan :

Pada Grafik menunjukan tren positif dari tahun 2022 ke Tahun 2024 dengan capaian kinerja persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosiokultural dan kompetensi pemerintahan di Tahun 2022 tercatat dari target 65%, dengan realisasi sebesar 65,6% atau capaian sebesar 101%, sedangkan di Tahun 2023 dengan target 75% di dapatkan realisasi sebesar 77,7% atau capaian 103,6%, dan pada tahun 2024 dengan target 80% di dapatkan realisasi sebesar 82% atau capaian sebesar 102,5%.

Tabel 3.10
Tabel Analisis Keberhasilan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan
1.	Meningkatkan kompetensi teknis, fungsional, kompetensi sosiokultural dan kompetensi pemerintahan ASN	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosio, cultural dan kompetensi pemerintahan	80	82	102,5	Capaian ini didukung di karenakan adanya mekanisme pembiayaan pelatihan dengan menggunakan BLUD

3.3.3 Persentase Peningkatan Program Pelatihan yang terakreditasi

Persentase peningkatan program pelatihan yang terakreditasi, diukur dengan cara membandingkan Jumlah Program Pelatihan yang diakreditasi pada tahun berjalan dibandingkan dengan total program pelatihan yang terakreditasi dikali 100%. Indikator ini pencapaiannya didukung oleh Bidang Sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembangaan dan sekretariat. Indikator ini pencapaiannya didukung melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Realisasi Akreditasi program pelatihan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.11
Tabel Pelatihan yang terakreditasi

No	Diklat yang telah terakreditasi	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Lembaga Penyelenggara Pelatihan Barang Jasa Pemerintah dari LKPP RI	B	A
2	Lembaga Pelatihan Terakreditasi dari LAN RI	Belum Terakreditasi	Terakreditasi ★
3	Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan dari ANRI	B	B

4	Pelatihan Kepemimpinan Administrastor dari LAN RI	B	B
5	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dari LAN RI	B	B
6	Pelatihan Dasar CPNS dari LAN RI	B	B

Pada Tahun 2024, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan 6 (enam) Akreditasi yaitu Akreditasi Pelatihan Barang dan Jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) RI dan Akreditasi Lembaga Pelatihan serta Program Pelatihan Manajerial dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.

Dari 6 (enam) Program Akreditasi tersebut terdapat 2 (dua) Program Akreditasi yang mengalami peningkatan yaitu :

1. Sebagai lembaga penyelenggaraan pelatihan barang jasa dari LKPP yang semula akreditasi B menjadi akreditasi A.
2. Sebagai lembaga pelatihan terakreditasi "★" dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI yang sebelumnya belum terakreditasi.

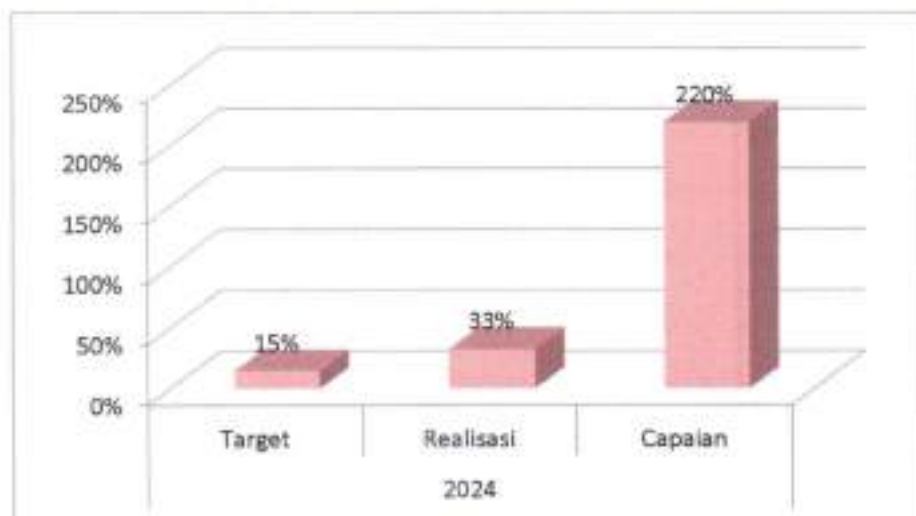
Dengan demikian capaian indikator Persentase peningkatan program pelatihan yang terakreditasi dari target sebesar 15% terealisasi sebesar 33%. Hal ini diperoleh dari perhitungan yaitu 2 program pelatihan yang mengalami peningkatan akreditasi dibagi 6 Total Program Akreditasi dikali 100%.

Keberhasilan ini menunjukkan komitmen BPSDMD Prov. Sumsel dalam meningkatkan kualitas program pelatihan guna mendukung peningkatan kompetensi aparatur daerah.

Tabel 3.12
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Targ et	Realis asi	Capaian %	Targ et	Realis asi	Capaian %
1.	Meningkatkan pengelolaan program pelatihan yang sesuai dengan standar	Persentase Peningkatan Program Pelatihan yang terakreditasi	n/a	n/a	n/a	15	33	220

Grafik 3.3
Persentase Peningkatan Program Pelatihan yang terakreditasi



Tabel 3.13
Tabel Analisis Keberhasilan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan
1.	Meningkatkan pengelolaan program pelatihan yang sesuai dengan standar	Persentase Peningkatan Program Pelatihan yang terakreditasi	15%	33%	220%	Capaian melebihi target, menunjukkan keberhasilan dalam peningkatan kualitas pelatihan. Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan seluruh program pelatihan mengalami peningkatan akreditasi dimasa yang akan datang.

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Keberhasilan pencapaian kinerja juga diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan jumlah anggaran yang ditetapkan. Adapun target dan realisasi baik dari aspek pendapatan maupun belanja BPSDMD Prov. Sumsel Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

3.4.1 Pendapatan

Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 terdiri dari Pendapatan Retribusi Jasa Usaha dan pendapatan BLUD, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.14
Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2024

No	Uraian	Target	Realisasi	Persentase
1.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	13.550.000.000	15.383.416.571	113,53%
2.	Penerimaan dari Silpa BLUD Tahun 2022	953.606.197	953.606.197	100%
	Jumlah	14.503.606.197	16.337.022.768	112,64

Pendapatan BPSDMD Prov. Sumsel Tahun Anggaran 2024, baik yang berasal dari BLUD dan penerimaan dari Silpa BLUD tahun sebelumnya dari target sebesar Rp.14.503.606.197,- dengan realisasi sebesar Rp.16.337.022.768,- atau sebesar 112,64%.

3.4.2 Belanja

Jumlah Total Pagu Anggaran Belanja Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 baik yang bersumber dari APBD maupun BLUD yaitu sebesar Rp. 37.973.147.766 dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 37.325.535.774 (98,29%). Dengan rincian realisasi sebagai berikut :

Tabel 3.15
Target dan Realisasi Belanja Tahun 2024

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		
			Keuangan (Rp.)	%	Fisik (%)
1	Belanja Operasi	36.329.754.266	35.686.123.144	98,23	100
	- Belanja Pegawai	14.504.207.689	13.888.350.770	95,75	100
	- Belanja Barang dan Jasa	21.825.546.577	21.797.772.374	99,87	100
2	Belanja Modal	1.643.393.500	1.639.412.630	99,76	100
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.068.160.000	1.065.419.000	99,74	100
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	575.233.500	573.993.630	99,78	100
	TOTAL BELANJA	37.973.147.766	37.325.535.774	98,29	100

Adapun rincian realisasi program/kegiatan pada Belanja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.16
Realisasi Program/kegiatan BPSDMD Prov. Sumsel tahun 2024

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK
				Realisasi (Rp)	%	%
1	2		3	4	5	6
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		36.759.047.766	36.148.049.334	98,34	100
	i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	256.210.000	230.500.000	89,97	100
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	41.291.788	82,58	100
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25.000.000	24.995.932	99,98	100
	3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25.000.000	24.919.942	99,68	100
	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	41.432.632	82,87	100

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK
				Realisasi (Rp)	%	%
1	2		3	4	5	6
	5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	106.210.000	97.859.706	92,14	100
	ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.504.207.689	13.888.350.770	95,75	100
	6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.461.027.689	13.849.350.770	95,77	100
	7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	43.180.000	39.000.000	90,32	100
	iii	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000	30.580.000	76,45	100
	8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000	30.580.000	76,45	100
	iv	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.585.000.000	1.444.622.546	91,14	6,16
	9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	140.000.000	139.997.718	100	100
	10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95.000.000	94.996.849	100	100
	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.000.000	74.514.300	99,35	100
	12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	14.918.000	99,46	100
	13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	60.000.000	60.000.000	100	100
	14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.200.000.000	1.060.195.279	88,35	100
	v	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.183.393.500	1.181.684.630	99,86	100
	15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	608.160.000	607.691.000	99,92	100
	16	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	575.233.500	573.993.630	99,78	100

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK
				Realisasi (Rp)	%	%
1	2		3	4	5	6
	vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.974.724.000	2.862.121.674	96,21	100
	17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000	10.145.000	50,73	100
	18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.196.000.000	1.098.356.674	91,84	100
	19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.758.724.000	1.753.620.000	99,71	100
	vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.711.906.380	1.671.032.530	97,61	100
	20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	348.287.950	311.521.100	89,44	100
	21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000	196.897.000	98,45	100
	22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	973.908.730	973.129.730	99,92	100
	23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.000.000	59.775.000	99,63	100
	24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	129.709.700	129.709.700	100	100
	viii	Peningkatan Pelayanan BLUD	14.503.606.197	14.839.861.179	102,32	100
	25	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	14.503.606.197	14.839.861.179	102,31	100

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK
				Realisasi (Rp)	%	%
1	2		3	4	5	6
II	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		1.214.000.000	1.176.782.445	96,93	100
	I	Pengembangan Kompetensi Teknis	302.587.345	302.586.595	100	100
	26	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	302.587.345	302.586.595	100	100
	II	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	911.512.655	874.195.850	95,91	100
	27	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	150.000.000	148.941.461	99,29	100
	28	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	212.212.655	185.415.293	87,37	100
	29	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	150.000.000	149.740.980	99,83	100
	30	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	399.300.000	390.098.116	98,67	100
	Jumlah : 30 kegiatan		37.973.147.766	37.325.535.774	98,29	100

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Secara umum pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Tahun 2024 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat mencapai target kinerja. Hal ini merupakan wujud keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta komitmen bersama semua pihak yang ada di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan visi, misi dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.

Selain itu, keberhasilan merealisasikan target kinerja juga merupakan wujud dari kepercayaan pemangku kepentingan dan pengguna jasa kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk terus menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta menjamin keberlanjutan pembangunan SDM Aparatur di Sumatera Selatan.

4.2 SARAN

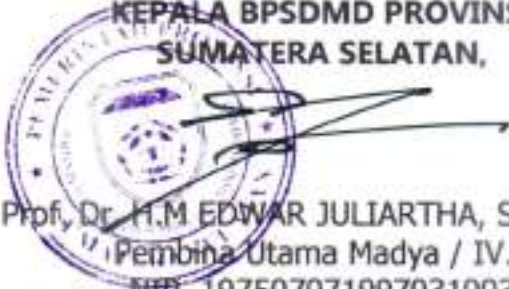
Untuk mengoptimalkan kinerja diklat aparatur ke depan, perlu lebih ditekankan pada pencapaian *outcomes* dan *benefit*, serta langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan di masa yang akan datang antara lain :

- a. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas program, dengan melakukan inovasi terhadap jenis-jenis diklat baru serta disesuaikan dengan kebutuhan akan peningkatan kompetensi;
- b. Mengembangkan sistem informasi kediklatan berbasis web, guna untuk menyediakan informasi/basis data kediklatan yang lengkap, akurat dan *real time*.

- c. Secara konsisten dan berkelanjutan melakukan perbaikan atau penyempurnaan penyelenggaraan diklat baik menyangkut materi, metode maupun sarana prasarannya;
- d. Meningkatkan aktivitas pengendalian dan melakukan pengawasan serta monitoring secara terus menerus atas semua kegiatan;
- e. Mengintensifkan konsultasi, koordinasi dengan pengelola kediklatan baik dengan instansi pembina diklat (pusat), provinsi maupun kabupaten/kota serta;
- f. Membuka jejaring yang lebih luas dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga.

Palembang, 12 Februari 2025

**KEPALA BPSDMD PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**



Prof. Dr. H.M EDWAR JULIARTHA, S.Sos, MM
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 197507071997031003